



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT INTERN
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DPR RI**

Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke	:	1
Jenis Rapat	:	RDPU
Sifat Rapat	:	Terbuka.
Hari, Tanggal	:	Rabu, 17 Juni 2020
Waktu	:	10.20 WIB – 12.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat BAKN
Acara	:	Pembahasan Mendapat masukan terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Subsidi Energi Listrik, BBM dan Gas
Ketua Rapat	:	Ahmad Syaikhu
Sekretaris Rapat	:	Mardi Harjo, S.E., M.Si.
Hadir Anggota	:	ANGGOTA BAKN DPR RI F-PKS (Ahmad Syaikhu) F-P. Demokrat (Marwan Cik Asan) F-P. Golkar (H.M Misbakhun, SE., M.H) F-PDIP (I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE, MM) F-PKB (H. Bachrudin Nasori, S.SI, M.M) F-P. NASDEM (Sugeng Suparwoto)

JALANNYA RAPAT:
F-PKS (AHMAD SYAIKHU):

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.

Yang Terhormat saudara Faisal Basri, S.E., M.A.,
Yang Terhormat saudari Dr. Enny Sri Hartati,
Yang Terhormat saudari Dr. Ir. Ratnayu Sitaresmi, M.T.,
Juga para anggota BAKN yang saya hormati saya banggakan.

Alhamdulillah puji syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas izinnya dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa melaksanakan RDPU secara fisik dan sebagian secara virtual.

Perlu saya sampaikan bahwa menurut peraturan tata tertib No. 1 tahun 2020 yang disebutkan dalam Pasal 254 ayat 4 semua jenis rapat DPR dihadiri oleh anggota kecuali dalam keadaan tertentu yakni keadaan bahaya, kepentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional, rapat dapat dilaksanakan secara virtual dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah sudah terhubung juga bersama kita Pak Agung Wakil Ketua, eh belum ya?

Dan ayat 5 disebutkan dalam hal jenis rapat DPR dilaksanakan secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat 4 kehadiran anggota dapat ditetapkan sebanyak 1 anggota untuk setiap fraksi kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan DPR. Dan ayat 6 disebutkan dalam hal kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak dapat terpenuhi, semua jenis rapat DPR tetap sah meskipun dihadiri oleh Pimpinan dan anggota secara virtual.

Kemudian dalam Pasal 274 ayat 1 menyebutkan bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Panitia Khusus atau Alat Kelengkapan DPR lainnya dengan perorangan, kelompok, organisasi, dan/atau badan swasta. Dan ayat 3 disebutkan bahwa perorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan.

Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan laporan dari Sekretaris BAKN DPR RI, RDPU BAKN DPR secara fisik dan virtual saat ini diikuti oleh 3 dari 9 anggota BAKN tapi karena ini tidak memerlukan kuorum jadi rapat ini akan tetap berjalan. *Insyallah* sebagian tadi sudah meminta izin untuk datang terlambat bergabung dalam rapat ini. Maka izinkanlah saya membuka Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini, dan rapat pada hari ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB)

Para Pimpinan dan para anggota BAKN,
Serta para undangan yang kami hormati.

Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu para pakar yang telah hadir dalam kesempatan ini dalam rangka mendapatkan masukan terkait

dengan kebijakan pengelolaan subsidi energi listrik, BBM dan gas. Secara teknis, pelaksanaan tugas BAKN terdapat dalam Undang-undang No. 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 17 tahun 2014 tentang MD3 dimana Pasal 112 D ayat 1 menyebutkan BAKN bertugas:

- a. Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR,
- b. Menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi,
- c. Menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi, dan
- d. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan serta penyajian dan kualitas laporan.

Selanjutnya sebelum kita mulai mendalami materi, izinkan saya ingin memperkenalkan Pimpinan dan anggota BAKN yang hadir dalam kesempatan ini. Yang sebelah kiri ini walaupun pendatang baru tapi senior di antara kita Pak Misbakhun dari Fraksi Partai Golkar di Dapil Jawa Timur II. Kemudian di samping beliau Pak Amir Uskara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dari Dapil Sulawesi Selatan I. Saya sendiri Ahmad Syaikh dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Jawa Barat VII.

Kemudian terkait dengan tema rapat kita pada hari ini, kami telah mengirimkan TOR pada para narasumber untuk pelaksanaan RDPU ini yang mana di dalamnya terdapat beberapa hal yang ingin kami dalam terkait dengan subsidi energi ini. Demikian saya kira pengantar dari saya. Selanjutnya kami persilahkan kepada para pakar untuk memberikannya terkait tema rapat kita dalam kesempatan hari ini. Mungkin Pak Faisal Basri dulu silakan.

NARASUMBER (FAISAL BASRI S.E., M.A):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera.

Bapak Pimpinan dan anggota BAKN.

Terima kasih telah mengundang saya. Mungkin judulnya Subsidi Energi harusnya. Kalau boleh ditayangkan terus. *Concern* saya harusnya tunggal saja yakni menegakkan disiplin anggaran, karena tugas utama DPR di bidang anggaran ini luar biasa. Iya lanjut.

Intinya adalah, sebelumnya. Jadi kuncinya adalah produksi turun terus dan konsumsi naik terus sehingga sekarang kalau konsumsi dikurangi produksi itu sudah nyaris 1000.000 barel/hari. Bagaimana cara menutupnya? Jadi kita bukan negara produsen minyak lagi. Nah oleh karena itu paradigmanya pun berubah. Kalau dulu namanya *oilbum* kalau harga minyak naik, sekarang sengsara. Kalau harga minyak turun itu rezeki buat Indonesia secara keseluruhan karena kita *net importir*. Lanjut.

Ini defisit *oil and gas* yang di bawah itu yang merah adalah impor, yang di atas ekspor sehingga defisitnya adalah yang garis hitam itu. Jadi kita sudah mengalami defisit cukup lama 10 tahun lebih, hampir 10 tahun, sekitar 10 tahun. Namun paradigma kita untuk subsidi ini masih tidak berubah, begitu. Di masa surplus maupun di masa-masa defisit sekarang. Lanjut.

Nah kalau tadi Migas defisit, energi kita masih surplus karena ada batu bara yang abu-abu itu. Jadi yang bantu kita batu bara bidang energi ini. Namun, ya tapi ini barangkali sudah berubah setelah Pandemi Covid-19. 2021 lanjut. 2021 energi pun kita sudah defisit dan defisit energi kalau *business as usual* itu akan mencapai 80 miliar USD pada tahun 2040. Jadi krisis energi di depan mata, begitu. Ini yang jadi *concern* kami. *Business as usual* enggak boleh, karena kan kalau kata (suara tidak jelas) itu siapa yang menguasai makanan, dia menguasai rakyat. Siapa yang menguasai energi, yang menguasai negara itu. Siapa yang menguasai uang, dia menguasai seluruh dunia. Jadi hati-hati. Ini defisit seperti ini kecenderungannya, dan akselerasinya akan cepat Bapak-Ibu sekalian. Ngeri sekali kalau saya lihat ini. Lanjut.

Nah sekarang apa pengertian subsidi? Jangan dibawa repot. Pokoknya Pemerintah menetapkan harga di bawah keekonomian. Enggak apa-apa Pemerintah mau gratiskan pun enggak apa-apa, tapi keekonomiannya namanya subsidi kalau gratis kan? Jadi disubsidi senilai keekonomiannya. Nah inilah, keekonomiannya sendiri pun bermasalah karena keekonomian kan mops ditambah alpha, begitu. nah mopsnya premium enggak ada di Singapura. Enggak ada (suara tidak jelas) untuk premium dan enggak ada (suara tidak jelas) untuk solar dengan sulfur seperti kita dan tidak ada lagi mops pertalite karena tidak ada lagi yang jual. Di dunia ini praktis hanya 1-2 negara saja.

Jadi rumusnya pun aneh-aneh dan kami sudah merekomendasikan waktu di tata kelola Migas itu bagaimana mengubahnya. Jadi harga keekonomian pun sudah bermasalah ini yang ditetapkan Pemerintah, yang dihitung oleh Pemerintah, harga keekonomian untuk premium, solar dan LPG 3 kg. Nah yang menarik di LPG distributor sampai pengecer tidak pernah menuntut kenaikan (suara tidak jelas). Tapi ini belakangan deh, bukan yang utama.

Nah jadi sepanjang Pemerintah menetapkan harga di bawah keekonomian ya namanya subsidi. Nah namun di era Pak Jokowi itu disiplinnya kacau. Di era Pak SBY, saya bukan untuk membandingkan pribadi, enggak sama sekali. Di era Pak SBY sepanjang kriterianya memenuhi tadi ya makanya namanya subsidi. Oleh karena itu subsidinya menggelembung. Pernah subsidi energi itu 300 an triliun. Sekarang kan kalau di APBN kita cuma di bawah 100. Lanjut.

Nah dibikin lah jenis-jenis BBM ini yang paling bawah itu BBM umum, yang tidak disubsidi. Tapi itu pun harganya harus direstui Pemerintah, tidak bisa mekanisme pasar penuh. Jadi waktu Shell, Pertamina jual pertamax mau naikan atau turunkan harus izin Pemerintah. Enggak jelas lagi. Kemudian pernah di era Pak Jonan kalau saya enggak salah, atau yang sekarang saya lupa, swasta enggak boleh mengimpor langsung BBM nya, harus lewat Pertamina. Pusing swastanya. Dia dulu masuk Indonesia karena boleh impor langsung. Nah kalau beli dari Pertamina 9600, beli langsung 7500. Lantas mereka *complain* ke Dirjen Migas, Dirjen Migasnya telepon sama Pertamina "*turunin dong*", *turunin*, jadi modal telepon. Jadi pengelolaan energi kita seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi saya gembira BAKN *concern* tentang ini.

Kemudian jenis BBM Khusus Penugasan. Ini juga tidak jelas. Ini premium yang dijual di luar Jamali (Jawa Bali Madura). Dapat tambahan ongkos angkut Rp. 500,- sekarang saya enggak tahu ya, kira-kira Rp. 500 / liter. Kenapa Jamali? Apa urusannya dengan Jamali? Balikpapan kan punya kilang. Banten tidak ada kilang tapi jauh dari kilang ya harganya sama, enggak jelas kenapa Jamali? Papua juga ada kilang, Dumai ada kilang tapi harganya disubsidi. Enggak jelas.

Kemudian BBM Tertentu atau BBM bersubsidi ini, minyak tanah dan solar. Jadi secara aturan premium itu tidak disubsidi, secara aturan menurut Perpres No. 191 tahun 2014. Tapi harganya ditentukan Pemerintah dan Pertamina diwajibkan untuk tidak menaikkan harga premium atau menurunkan harga premium, tapi tidak jadi subsidi kalau harga Pemerintah itu di bawah ongkos, tidak ada subsidi. Ya sudah tenang saja kata Pemerintah, nanti hitung-hitungannya gampang. Yang penting tidak lewat DPR, begitu saja. Keluarlah namanya dana kompensasi.

Nah dana kompensasi ini bayarnya suka-suka Pemerintah sehingga piutang BUMN Pertamina dan PLN itu melonjak luar biasa sampai 3 tahun enggak dibayar-bayar. Menyebabkan *cash flow* BUMN itu terganggu. Menyebabkan PLN pada bulan Desember yang lalu tidak punya uang untuk bayar hutang yang jatuh tempo. Akhirnya kalah, Pemerintah *nyicil* dulu 9 triliun, begitu. Ini kan bukan perkumpulan RT, ini perkumpulan Republik Indonesia. Itulah yang menimbulkan dana besar untuk dana kompensasi tapi masuknya ke Covid. Apa urusannya dengan Covid juga tidak ada sama sekali. Jadi sebetulnya stimulus untuk Covid kecil sekali. Ada, tidak ada stimulus kan itu harus dibayar oleh Pemerintah. Jadi kacau, tambah kacau. Lanjut.

Jadi kalau untuk mengurangi subsidi, logikanya kasih insentif untuk non ICE *vehicle* biar enggak pakai BBM. Tapi tidak juga arah ke sana. Tapi digunakan cara-cara yang aneh, begitu. Lanjut. Muncul biodiesel. Subsidi energi yang belum masuk biodiesel tiba-tiba di tengah pandemi ada subsidi untuk Martua Sitorus dan kawan-kawan 2,8 sekian. Karena apa? Dana sawitnya September ini habis yang 50 dolar/ton itu yang dikelola oleh Kementerian Keuangan kalau enggak salah. Dulu Kemenko, sekarang ditambah lagi 5 jadi 55 dolar. Jadi makanya tidak ada di APBN itu pakai dana sawit itu, non *budget* dana sawit nah sawitnya mau habis.

Maka untuk mengamankan Martua Sitorus dan kawan-kawan keluarlah dana 2,87 triliun itu di APBN Pandemi. Martua Sitorus itu bayar pajaknya 700 milyar, dapat subsidinya 1,2 T dan kawan-kawan ya maksudnya. Jadi dimanfaatkan pandemi ini untuk memasukkan kedaruratan ini. Karena selisih harga CPO dengan harga minyak makin tinggi. Muncul masalah baru, subsidi BBM belum beres, sebentar lagi muncul subsidi B30. Jadi menciptakan masalah baru lagi, pos baru lagi seperti dulu LPG. Mengurangi subsidi minyak, subsidi minyak tanah yang paling besar, sekarang subsidi LPG nya meledak. Enggak kunjung selesai kita mengurus energi ini. Lanjut.

Nah ini, nama PT-PT nya ini ada 11 kalau enggak salah supaya kita, kalau saya mau bikin pabrik biodiesel enggak bakal dikasih oleh Pemerintah karena mereka set kapasitas tinggi, memanfaatkan kapasitasnya. Tahun lalu ya harus saya sampaikan ini. Tahun ini belum saya *update*, tapi tahun lalu itu kira-kira bulan Oktober kira-kira cuma 35% kapasitas yang dipakai. Investasi mereka tinggi kan? Untuk kapasitas yang tinggi itu pemanfaatannya 35%. Tapi bisnis ini dijamin tidak rugi karena apa? Kalau ada selisihnya otomatis ditutup oleh Pemerintah makanya duitnya habis. Lanjut.

Nah sehingga Bapak-Ibu sekalian, yang namanya data subsidi di APBN bukan subsidi saja, yang lain-lain juga semu. Subsidi tidak naik, tetapi muncul penugasan pada BUMN Pertamina dan PLN. Muncul istilah dana kompensasi. Dana kompensasi itu kalau tidak salah untuk PLN saja waktu kami rapat dengan PLN kira-kira 75 ya, sampai akhir tahun ini 75 triliun. Terus gali lubang tutup lubang. Bayar sedikit, tambah lagi, bayar sedikit, tambah lagi. Tidak ada penyelesaian sampai sekarang. Karena apa? Pencairannya bisa lebih dari 1 tahun. 3 tahun yang lalu juga belum dibayar penuh, begitu. Ini mengurus negara kok kaya begini?

Belum ditambah penugasan lain, BBM satu harga diserahkan pada Pertamina, kan enggak boleh? Pemerintah boleh melakukan penugasan apa pun, tapi pertanggung jawabannya ada di APBN. Enggak boleh dititip-titipkan di BUMN. Ini juga seperti BUMN-BUMN karya. Penugasan, Utama Karya kan penugasannya paling luar biasa, dapat dana Covid nya juga paling banyak. Tapi masuknya di Covid supaya anggota DPR maklum ini krisis karena Covid. Tidak ada urusannya dengan Covid penugasan ini. sampai ada 3 jenis kan BUMN dapat itu. Penyertaan modal negara dapat, kemudian halaman investasi itu karena tidak bisa bayar hutang itu. Tapi (suara tidak jelas) investasi harus dibayar, memangnya Pemerintah bank?

Atas nama Covid karena Pemerintah posisinya kuat di DPR 67%, 68% kursi Pemerintah. Sehingga apa pun kalau saya diskusi dengan anggota DPR, kritis tapi kalau ada perintah Ketum ya kita patuh Pak katanya. Ya sudah. Jadi penggerogotan kehidupan bernegara yang sehat. Bangun rumah sakit, Pertamina suruh bangun rumah sakit untuk Covid ini. *Ngeluh* tapi kita enggak bisa berbuat apa-apa Pak. suka-sukanya. Ibu kota baru suruh bangun, menara BUMN itu Pertamina yang harus bangun. Dan Pertamina wajib untuk pindah seluruhnya ke Ibu kota baru. Menurut saya rencana-rencana seperti ini harus kita hentikan lah. Di sini peran parlemen luar biasa. Oleh karena itulah harus ada transparansi secara fiskal, harus dipertanggung jawabkan satu sen pun anggaran, itu. Lanjut.

Jadi kebijakannya tambal sulam. Hendak mengurangi impor minyak dengan mengalokasikan produksi dalam negeri untuk kilang domestik. Jadi kalau produksi dalam negeri dipakai di domestik kan impornya berkurang, tapi kan ekspornya turun juga. Jadi 0 efeknya 0. Cuma kelihatan di statistik impor itu turun. Hendak mengurangi impor BBM dengan melarang swasta impor langsung, tadi yang sudah saya sampaikan. Hendak menekan defisit karena (suara tidak jelas) tapi hasilnya tidak signifikan.

Sebetulnya saya diminta *review* kajian tentang BBM ini tapi belum selesai dan saya belum minta izin ke yang meneliti, harus izin. Tapi intinya adalah sangat tidak signifikan. Karena apa? Kalau pakai biofuel, kalau pakai CPO, ekspor CPO nya kan turun. Impor minyaknya turun tapi ekspor CPO nya juga turun. Jadi karena (suara tidak jelas) nya tidak signifikan, cuma ratusan juta dolar sampai 1 milyar dolar. Mungkin puluhan juta dolar, 70 juta dolar atau berapa itu. Jadi tidak signifikan. Enggak mengurangi subsidi BBM tapi muncul post subsidi biofuel atau Fame.

Lanjut, ini yang terakhir. *Concern* Pemerintah kan inflasi. Inflasi itu paling tidak populer buat politisi. Oleh karena itulah tidak pernah berani dinaikkan harga BBM menjelang pemilu. Pas jadi Presiden Pak Jokowi langsung naikkan tapi itu sekali dan terakhir. Kita pikir tadi mau reformasi total, tapi sekali dan terakhir saja yang secara signifikan. Nah oleh karena itu menurut saya yang paling pertama ini harus tegakkan aturan. Aturannya sudah ada tapi tidak diterapkan. Kalau saya tanya Pak Dirjen dulu, kok enggak diterapkan aturannya? Oh tetap ditegakkan, kan dievaluasi setiap 3 bulan. Ya kita evaluasi, tapi kesimpulannya kita harga tetap, harganya tidak dinaikkan. Iya itu namanya silat lidah. Ketakutan harga BBM berfluktuasi sehingga menyumbang pada inflasi, bisa dikurangi dengan dana tabungan.

Misalnya sekarang ini, kan harusnya kalau harga pertamax plus di Malaysia Bapak-Ibu sekalian, bulan Mei kemarin itu cuma 4800, pertamax plus ron 95, 4800. Makanya saya tadi pertanyakan, harga keekonomian Pemerintah itu kok tinggi benar, begitu. Nah jadi oke kalau harga *anjlok*, kan harusnya harga BBM *anjlok* juga. Enggak, separuhnya yang dikasih ke konsumen. Penurunannya 50% ini cuma 25%. 25% nya ditabung. Sehingga waktu harga naik, tidak otomatis dinaikkan serta merta *full*, tapi pakai dana tabungan dulu. Kalau dana tabungannya turun, sudah merosot,

baru dinaikkan. Ada mekanisme untuk meyakinkan Pemerintah bahwa inflasi itu tidak harus jadi *concern* aman. Dan luar biasanya memang inflasi di era Pak Jokowi konsisten rendah, tapi dengan injak kaki sebetulnya. Harga listrik sudah 3 tahun tidak boleh naik padahal sudah ada *adjustment*, otomatis kan tidak ada masalah.

On and off PPN, jadi misalnya kan ada PPN atau ada dana apa, kita masukkan di sana. Kalau harga sedang naik, PPN nya dihapus. Menteri Keuangan tentu saja tidak setuju, tapi sejenis seperti itu ada instrumennya, jangan injak BUMN terus. Dan terakhir adalah menggalakkan eksplorasi dan eksploitasi dengan rezim yang fleksibel. Bapak-Ibu coba bayangkan kalau kita impor saja itu Pemerintah enggak dapat apa-apa. Enggak dapat dana bagi hasil, enggak dapat pajak karyawan, enggak ada. Tapi coba kalau produksi meningkat, produksi minyak meningkat maka ada bagian Pemerintah di sana. Ada PPN ada PPH, keuntungan perusahaan dan macam-macam banyak sekali.

Nah oleh karena itu kalau Bapak-Ibu simulasi itu akan jauh lebih bermanfaat kalau kontraktor minyak itu tidak dikenakan bagi hasil. Jadi *tax* rezim saja seperti perusahaan-perusahaan lain. Itu niscaya produksi akan naik. Sederhana Pak, niscaya produksi akan naik. Nah kalau sekarang Indonesia minat investasi di Migasnya turun terus karena misalnya di Mexico pakai *grow split* tapi jatah pengusaha itu jatah kontraktor 95%. Kita pakai *grow split* paling cuma 67%.

Jadi kita bukan surga lagi buat produsen minyak. Oleh karena itulah maka kita harus lewat menggalakkan eksplorasi dan eksploitasi itu ongkosnya lebih murah, jauh lebih murah ketimbang mengembangkan B20, B30 demi kepentingan segelintir pengusaha yang sudah menjadi *bodyguard* di negeri ini, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Faisal Basri, S.E., M.A yang sudah memberikan penjelasan yang gamblang pada kita tentang subsidi minyak dan gas. Kita lanjutkan pada Dr. Enny Srihartati, M.A, nanti kemudian nanti kita akan *sharing* di belakang. Silakan Bu.

NARASUMBER (Dr. ENNY SRIHARTATI, M.A):

Terima kasih.

**Pak Ketua Pak Ahmad Syaikh,
Dan tadi ada Pak Amir Uskara,
Dan juga Bapak-Ibu Tenaga Ahli BAKN,
Dan semua yang hadir dalam forum ini.**

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jadi persoalan-persoalan krusial dan sebenarnya yang menjadi biang kerok dari persoalan energi tadi sudah disampaikan oleh Pak Faisal Basri. Mungkin Pak Ketua saya hanya akan lebih, apa sih dari persoalan-persoalan yang krusial tadi implikasinya terhadap perekonomian kita dan utamanya terhadap kehidupan masyarakat kita? Kira-kira seperti itu dan mungkin saya akan menyampaikannya merunut sesuai dengan pertanyaan yang kemarin dikirim oleh BAKN.

Jadi pertama kemarin pertanyaannya, apakah kebijakan dan metode dalam pemberian subsidi energi yang diterapkan oleh Pemerintah saat ini sudah cukup baik atau belum? Begitu kan. Maka marilah kita runut, sebenarnya apa sih esensi

atau urgenitas dari Pemerintah harus mengeluarkan subsidi? Tadi sudah di hantarkan oleh Pak Faisal mengenai harga keekonomian, tetapi yang pasti secara kepentingan atau kebutuhan ekonomi esensi dari subsidi ini kan sebenarnya mengoreksi terjadinya *market failure*, atau kegagalan pasar. Jadi antara harga keekonomian dengan akses masyarakat ini belum seimbang. Jadi kalau masyarakat kita sudah mampu semua, sebenarnya enggak perlu ada subsidi. Tetapi ada sebagian masyarakat kita yang masih belum beruntung nasibnya, masih miskin sehingga kalau harga subsidi atau karena energi ini merupakan faktor produksi utama dan sangat mempunyai dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, maka ini yang harus perlu dijaga.

Nah cuma persoalannya sebenarnya, kalau bisa saya sampaikan dengan kalimat pendek, mengapa subsidi yang sebenarnya bukan barang haram ini menjadi satu polemik yang berkepanjangan? Karena kembali tadi esensi dari subsidi yang seharusnya menjadi penetralisir, mengoreksi *market failure*, tetapi justru menciptakan *government failure*. Jadi dengan adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah yang di (suara tidak jelas) diceritakan disampaikan Pak Faisal tadi itu malah membuat kebijakan ini menjadi sumber *failure* lagi dari adanya kebijakan Pemerintah yang kita sebut subsidi. Apa buktinya?

Mari kita misalnya kembali bahwa esensi dari subsidi tadi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Tapi coba kita lihat apakah energi yang menjadi kebutuhan kita dalam perekonomian ini sudah memenuhi, mendorong kita untuk bisa mencapai memiliki energi yang efisien? Jadi kalau pada awalnya untuk agar masyarakat semua mampu mengakses energi ini, maka kan sebagian diberi subsidi. Tetapi mestinya di samping itu secara paralel, Pemerintah pada prinsipnya karena energi merupakan faktor produksi yang sangat vital, mestinya target utamanya adalah bagaimana menciptakan faktor produksi yang vital tadi menjadi efisien? Artinya efisien itu yang benar-benar mampu dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi secara sederhana kan sebenarnya teorinya sesederhana itu.

Nah tetapi dengan adanya subsidi ini, mengapa tadi saya sampaikan justru menciptakan *government failure*? Karena dengan adanya subsidi bukan semakin kita mampu menuju swasembada energi, tetapi yang terjadi justru peningkatan ketergantungan energi kita terhadap impor ini malah semakin menjadi-jadi atau semakin membesar. Nah jadi, satu, kita sudah menyalahi dari esensi urgenitas adanya subsidi itu sendiri. Dan yang kedua, dengan adanya subsidi ini justru menciptakan ketergantungan energi impor.

Nah jadi pertanyaan yang pertama ini sebenarnya cukup *simple* dijawab. Apakah subsidi yang diterapkan oleh Pemerintah sudah cukup baik? Itu dari dua hal itu saja sudah kontra-produktif antara tujuan utama dengan apa yang seharusnya terjadi. Nah sehingga mestinya bagaimana agar subsidi ini energi ini mampu punya dampak, mestinya bagaimana Pemerintah juga memberikan satu insentif justru terhadap pengembangan energi-energi alternatif yang mampu mendorong terpenuhinya energi yang betul-betul tadi, tidak hanya efisien, tetapi juga bisa kita penuhi dari pasokan dalam negeri. Dan nanti kalau mau kita *explore*, apakah, selamat datang Pak Ketua.

Jadi apakah itu memungkinkan? Sangat-sangat memungkinkan. Karena sumber alternatif dari, atau energi-energi alternatif yang kita miliki ini sangat terbuka, artinya potensinya sangat banyak. Nah cuma yang menjadi persoalan adalah ketika BBM ini dalam tanda kutip kita biarkan murah, maka sudah pasti ini akan menjadi disinsentif untuk pengembangan atau lahirnya energi-energi alternatif tadi, begitu.

Nah kedua adalah, tadi sudah ketergantungan impor tadi. Jadi ketergantungan impor ini kan efeknya tidak hanya terlihat dari dampak terhadap inflasi atau yang pasti dengan adanya ketergantungan impor maka nasib ketahanan energi kita sangat ditentukan oleh kondisi eksternal. Nah sementara kondisi eksternal sudah hampir bisa kita pastikan tidak *undercontrolled* kebijakan-kebijakan dalam negeri kita. Nah sehingga dari situ saja sudah menimbulkan risiko yang sangat besar terhadap kesinambungan atau kepastian dalam pemenuhan energi di dalam negeri kita.

Belum lagi kalau sering disampaikan tadi, banyak kepentingan-kepentingan politik yang lebih mewarnai. Jadi artinya kepentingan jangka pendek, mungkin kepentingan politik secara ekonomi sebenarnya ini lebih di, kalau mau *khusnuzon* itu sebenarnya ya lebih untuk memprioritaskan kepentingan-kepentingan jangka pendek. Artinya untuk menghindarkan syok apabila terjadi kenaikan BBM dan sebagainya yang harus dihindari karena berisiko untuk terjadinya gejolak sosial yang ada di masyarakat dan sebagainya.

Nah ketiga, mengenai beban fiskal. Jadi memang dengan adanya kebijakan pengurangan subsidi yang 2020 ini kan hanya tinggal secara total, subsidi energi tinggal 125,3 triliun. Jadi kalau kita bandingkan posisi 2014 misalnya yang masih lebih dari 341 triliun ini memang sudah mengalami penurunan yang sangat jauh. Nah tetapi persoalannya, apakah beban fiskal atau penurunan beban fiskal ini tidak mengalihkan atau tidak terjadi *shifting* terhadap beban yang lain?

Nah jadi kalau kita lihat sekarang, dengan adanya penurunan subsidi energi ini kan menyebabkan berbagai macam dan terutama ini muncul pas Covid kemarin, pengaduan terhadap PLN itu lebih dari 68.000 pelanggan. Jadi kalau yang mengadu saja, itu yang mengadu. Bisa jadi yang terdampak dan tidak mengadu ya lebih dari itu. Artinya ada hampir 70.000 orang pelanggan yang melakukan pengaduan. Nah di antaranya karena terjadi pembengkakan tagihan listrik. Bisa jadi memang pembengkakannya karena *work from home* karena yang tadinya biasanya kalau siang penggunaan listriknya dikantor menjadi di rumah dan sebagainya. Tetapi titik krusialnya adalah bahwa ketika terjadi penurunan beban fiskal karena subsidi ini dikurangi, tetapi kita lihat bagaimana realokasi dari besaran subsidi ini mengurangi beban masyarakat atau tidak?

Jadi kan dulu selalu disampaikan bahwa subsidi BBM ini tidak tepat sasaran karena yang menikmati lebih banyak orang kaya yang memiliki kendaraan atau konsumsi yang terbesar tentu yang memiliki mobil. Nah pertanyaannya, setelah subsidi energi ini dikurangi, apakah hak yang seharusnya menerima subsidi tadi bertambah atau tidak? Nah ternyata tidak, begitu kan.

Nah di samping itu sebenarnya yang harus dijaga dalam perekonomian itu kembali ke tadi. Jadi apakah Pemerintah mampu menyiapkan atau menyediakan energi yang betul-betul relatif terakses oleh masyarakat atau tidak? Karena sekalipun masyarakat miskin itu konsumsi BBM nya tinggi, tapi kalau harga energi ini tetap tidak efisien, maka yang menikmati beban terbesar tetap orang miskin karena menyebabkan, mendorong harga-harga menjadi tidak ekonomis sehingga mereka juga harus membayar lebih mahal. Sementara kompensasi dari kenaikan harga-harga yang diakibatkan oleh pengurangan subsidi itu juga belum tentu sepadan. Nah sehingga ini yang menimbulkan angka orang miskin dan sebagainya tidak banyak mengalami penurunan yang signifikan.

Jadi Bapak-Ibu sekalian,